



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 31 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perjalanan dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589)
;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo ;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah Kota Palopo;
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2015

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota dan/atau Wakil Walikota Palopo.
4. Walikota adalah Walikota Palopo.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palopo.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota palopo.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota palopo yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999.
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang bertugas menetapkan Uang Muka (Panjar) bagi pelaksana SPPD dan melakukan perhitungan Rampung biaya perjalanan dinas.
15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palopo.

16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Surat Perintah adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Perintah Pimpinan dalam rangka pelaksanaan Tupoksi dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat perintah perjalanan dinas
20. Surat Tugas adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Masuk atau undangan dari Instansi Lainnya dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat perintah perjalanan dinas
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat, PNS/CPNS serta pegawai Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.
22. Pelaksana SPPD adalah PNS dan/atau Non PNS yang diperintahkan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri
- (3) Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada :
 - a. Walikota dan Wakil Walikota
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD
 - c. Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - d. Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap.
 - e. Anggota kelompok masyarakat dan/atau individu yang memiliki keterkaitan terhadap perjalanan dinas atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas Dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana berikut:
 - a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah.
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) Dalam rangka penyediaan anggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas harus memenuhi azas-azas :
 - a. Azas Kewajaran berarti bahwa anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, namun tidak menimbulkan kesenjangan yang besar antara unit dalam SKPD dan antar SKPD.
 - b. Azas kepatutan berarti kesesuaian dengan bobot dan beban tugas dengan kapasitas dan jumlah personil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, sedangkan;
 - c. Azas rasionalitas berarti beban tugas perjalanan dinas lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan metode lain yang dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas misalnya mengirim berkas melalui jasa pengiriman, mengirim data/informasi melalui media elektronik, dll.

BAB IV
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Palopo.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat diberikan untuk kegiatan Peninjauan lapangan (monitoring), pemeriksaan, inspeksi mendadak (sidak), pendataan, penyuluhan dan reses.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang memerlukan waktu paling kurang 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari

Pasal 5

Biaya Perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsom untuk:

- a. Walikota, Wakil Walikota, pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Paling tinggi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari;
- b. PNS dan Non PNS diberikan paling tinggi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 6

Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka:

- a. studi banding, konsultasi dan sejenisnya;
- b. menghadiri undangan rapat, seminar, Sosialisasi, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya;
- c. detasering atau Penugasan sementara waktu;
- d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadapi majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadapi seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas, kursus, Bimbingan Tekhnis dan sejenisnya;
- g. melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota;
- h. mengambil/menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- i. Kegiatan lainnya yang dinilai menunjang program Pemerintah Kota Palopo.

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Uang Harian
 - b. Biaya Transportasi/ Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - c. Biaya Penginapan
 - d. Uang Representasi
 - e. Sewa kendaraan dalam kota;
 - f. Biaya angkutan dan pemetaan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Uang Harian Luar Daerah
 - b. Uang Harian Diklat yang diberikan pada saat melaksanakan perjalanan dinas yang biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyelenggara atau biaya Kontribusi ditanggung peserta.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Biaya moda transportasi/Sewa Kendaraan Antar Kota dari dan ke tempat tujuan;
 - b. Biaya penggantian BBM
 - c. Biaya Taxi untuk perjalanan dari dan ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun
 - d. Retribusi yang dipungut di terminal bus/Stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi diberikan berupa uang penggantian BBM dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta dibayarkan sesuai Bukti pembelian BBM.
- (5) Uang penggantian BBM diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut:
 - a. Kendaraan sampai dengan 1.600 cc minimal menempuh jarak 7 KM/liter
 - b. Kendaraan sampai dengan 1.800 cc minimal menempuh jarak 6 KM/liter
 - c. Kendaraan sampai dengan 2.000 cc minimal menempuh jarak 5 KM/liter
 - d. Kendaraan sampai dengan 3.200 cc minimal menempuh jarak 4 KM/liter
- (6) Sewa kendaraan Antar Kota diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta pelaksana SPPD lebih dari 3 (Tiga) Orang apabila tidak ada Kendaraan Umum yang memadai untuk sampai ke tempat tujuan.
- (7) Pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, maka diberikan biaya Transportasi paling tinggi sebesar nilai harga tiket kendaraan umum dari dan ke tempat tujuan dengan melampirkan bukti Nota Pemakaian BBM.

- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau tempat penginapan lainnya dan dibayarkan sesuai Bukti pembayaran.
- (9) Pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (10) Perhitungan jumlah hari penginapan diperoleh dari jumlah hari perjalanan dinas dikurang 1 (satu) hari.
- (11) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan beserta Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (12) Jumlah hari perjalanan dinas untuk Sopir pengantar Pelaksana Perjalanan Dinas dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal mengantar Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas melebihi 6 (Enam) hari maka jumlah hari Perjalanan dinas untuk Sopir paling lama 6 (Enam) hari.
 - b. Jumlah hari Perjalanan dinas Sopir sebagaimana dimaksud pada huruf a., sudah termasuk jumlah hari untuk mengantar dan menjemput Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (13) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan dibayarkan secara at cost.
- (14) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan bakar minyak dan Pajak, dengan klasifikasi kendaraan yang disewa sebagai berikut:
- a. Walikota Palopo untuk sewa kendaraan dengan Kapasitas Kendaraan paling tinggi 3.200 cc.
 - b. Wakil Walikota Palopo dan Ketua DPRD untuk sewa kendaraan dengan Kapasitas Kendaraan paling tinggi 2.000 cc.
 - c. Sekretaris Daerah dan Pimpinan beserta anggota DPRD untuk sewa kendaraan dengan Kapasitas Kendaraan paling tinggi 1.800 cc.

- (15) Biaya angkutan dan pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f diberikan hanya untuk perjalanan dinas mengambil atau menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia di Luar Kota Palopo.

Pasal 8

- (1) Pemberian biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a, diberikan paling lama 3 (tiga) hari penugasan dalam provinsi dan paling lama 5 (lima) hari penugasan keluar provinsi untuk satu tempat konsultasi.
 - b. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan.
 - c. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan sesuai hari penugasan;
 - d. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan;
 - e. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan;
 - f. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan;
 - g. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan;
 - h. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf h diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikutsertakan keluarga/pendamping Paling banyak 2 (Dua) orang;
 - i. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, waktu pelaksanaan paling lama 5 (Lima) hari, dan pelaksanaan SPPD termasuk pihak keluarga paling banyak 2 (Dua) orang.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksana SPPD melampirkan bukti yang dapat menunjukkan alasan kelebihan jumlah hari tersebut.

Pasal 9

- (1) Standar Biaya perjalanan dinas Untuk PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Standar Biaya Perjalanan Dinas untuk Walikota dan Wakil Walikota diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

- (3) Standar Biaya Perjalan Dinas untuk Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- (4) Fasilitas Angkutan dan Pemetian untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan beserta Anggota DPR disetarakan dengan Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh Istri/Suami dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan apabila terlibat langsung dengan kegiatan perjalanan Dinas dimaksud dan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai biaya perjalanan dinas pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD yang bersangkutan.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon II B, Wakil Ketua PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Jabatan Lainnya pada Struktur PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV dan Anggota PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Staf.
- (7) Dalam hal mengikutsertakan Tenaga Ahli dalam perjalanan dinas yang tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari Kantor/Lembaga/Instansi yang bersangkutan, maka Tenaga Ahli tersebut dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Kepala SKPD tempat penugasan.
- (8) Dalam hal mengikutsertakan masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan perjalanan Dinas dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Staf.
- (9) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas maka Pejabat Pelaksana Tugas tersebut diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Jabatan yang sebenarnya/defenitif.

Pasal 10

Komponen biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang harian dapat dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dengan memperhatikan batas maksimal untuk harga satuannya dan bagi Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas roda empat, penggunaan BBM diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan batas maksimal penggunaan BBM.

- c. Biaya Transportasi untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan dan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran.
- d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil, kecuali dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- f. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- g. Biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil dan diberikan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPPD dapat menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perikatan yang meliputi biaya moda transportasi, penginapan dan/atau makan minum kegiatan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah.
- (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menemukan hotel/penginapan yang sesuai dengan satuan biaya hotel/penginapan dalam suatu Daerah maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah dan membuat surat pernyataan tanggungjawab.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dana.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan namun dana perjalanan dinas tidak tersedia, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan kelebihan hari tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan/atau uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah adanya persetujuan Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelalaian dari kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya.
- (3) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas keluar negeri dilakukan dalam rangka:
 - a. Studi banding, konsultasi dan sejenisnya;
 - b. Menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya;
 - c. Melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - d. Mengambil/menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri mengikuti Standar Biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Tata Cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Keluar Negeri mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan pelaksanaan SPPD yang dituangkan dalam surat tugas setelah mendapatkan persetujuan prinsip secara tertulis/lisan dari Walikota untuk perjalanan dinas keluar Provinsi dan Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Dalam Provinsi.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD, Pejabat dan/atau Staf Lingkup Sekretariat Daerah.
 - c. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat atau Staf yang berada di SKPD yang dipimpinnya.
 - d. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan untuk menandatangani surat tugas, maka dapat diwakili oleh pejabat yang berada satu tingkat dibawahnya.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Pelaksana SPPD.
- (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan Standar Biaya perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (4) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Penyusunan rincian perkiraan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPTK atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk melakukan perhitungan perkiraan besaran jumlah biaya perjalanan dinas.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas Pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) atau pembayaran langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan Studi banding, konsultasi, Diklat dan sejenisnya;
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksanan SPPD oleh bendahara pengeluaran melalui PPTK.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat Tugas;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kwitansi/tanda terima uang muka;
 - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas dari PPTK.

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme GU/TU/LS dilakukan melalui transfer dari kas daerah ke rekening bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dilaksanakan melalui perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka proses pengadaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan maka kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor melalui bendahara pengeluaran.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, maka dapat diajukan untuk pembayaran kekurangan melalui mekanisme GU/TU/LS.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan pelaksana SPPD/ Pejabat yang menerbitkan surat tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
 - b. Surat pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas jabatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
 - c. Pernyataan/Tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dan perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD.
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
 - c. Tiket pesawat, Boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
 - d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan, jasa hotel penginapan atau Bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.
 - e. Laporan hasil perjalanan Dinas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan/atau bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf c dan d tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- (4) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.

Pasal 23

Pelaksana SPPD yang melakukan pemalsuan dokumen atau menaikkan dari harga sebenarnya (mark up) dan/atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan dinas, bertanggungjawab penuh atas perbuatan tersebut.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Kepala SKPD melaksanakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip perjalanan Dinas dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25





- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota atau

dapat berpedoman pada Satandar biaya masukan yang digunakan oleh Kementerian sesuai Tahun Anggaran berjalan.

(2) Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

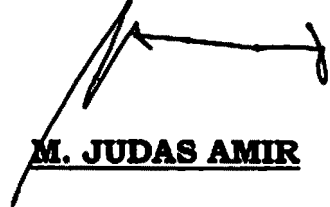
(3) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten <i>I</i>		
3. Kabag <i>Hubus</i>		
4. Kasubag <i>Dok & Per/ HKM</i>		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 20 Oktober 2014.

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 20 Oktober 2014.

Plt. **SEKRETARIS DAERAH,**


MUHAMMAD KASIM ALWI

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 31 TAHUN 2014

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO

Nomor : 31 Tahun 2014

Tanggal: 20 Oktober 2014

Tentang : Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015

**SATUAN BIAYA HARIAN
PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

No.	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN	
			LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	NANGROE ACEH	OH	Rp 360,000	Rp 110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
3	RIAU	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
5	JAMBI	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
9	BENGKULU	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410,000	Rp 120,000
11	BANTEN	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530,000	Rp 160,000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420,000	Rp 130,000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410,000	Rp 120,000
17	BALI	OH	Rp 480,000	Rp 140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440,000	Rp 130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360,000	Rp 110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
26	GORONTALO	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410,000	Rp 120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
	Kecuali:			
	KAB. LUWU	OH	Rp 300,000	Rp 110,000
	KAB. LUWU UTARA	OH	Rp 300,000	Rp 110,000
	KAB. TORAJA UTARA	OH	Rp 300,000	Rp 110,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
31	MALUKU	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
33	PAPUA	OH	Rp 580,000	Rp 170,000
34	IRIAN JAYA BARAT	OH	Rp 480,000	Rp 140,000

Catatan:

Pejabat yang menduduki Eselon II dapat diberikan Uang Representasi dengan nilai sebagai berikut:

a. Eselon II A atau yang disetarakan diberikan paling tinggi Rp. 150.000/Hari

b. Eselon II B atau yang disetarakan diberikan paling tinggi Rp. 100.000/Hari

**SATUAN BIAYA HARIAN, REPRESENTASI DAN AKOMODASI KEPALA DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

No.	TUJUAN	UANGHARIAN		REPRESENTASI		AKOMODASI
		LUAR DAERAH	DIKLAT	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	
1	2	4		5	6	7
1	NANGROE ACEH	Rp. 360,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,420,000
2	SUMATERA UTARA	Rp. 370,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,960,000
3	RIAU	Rp. 370,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,817,000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp. 370,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,275,000
5	JAMBI	Rp. 370,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,000,000
6	SUMATERA BARAT	Rp. 380,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,240,000
7	SUMATERA SELATAN	Rp. 380,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,680,000
8	LAMPUNG	Rp. 380,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,960,000
9	BENGKULU	Rp. 380,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 1,300,000
10	BANGKA BELITUNG	Rp. 410,000	Rp. 120,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,335,000
11	BANTEN	Rp. 370,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,808,000
12	JAWA BARAT	Rp. 430,000	Rp. 130,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,664,000
13	D.K.I. JAKARTA	Rp. 530,000	Rp. 160,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 8,720,000
14	JAWA TENGAH	Rp. 370,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,146,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp. 420,000	Rp. 130,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,620,000
16	JAWA TIMUR	Rp. 410,000	Rp. 120,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,400,000
17	BALI	Rp. 480,000	Rp. 140,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,881,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp. 440,000	Rp. 130,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,429,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp. 430,000	Rp. 130,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,000,000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp. 380,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 2,400,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp. 360,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,000,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp. 380,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,250,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp. 430,000	Rp. 130,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,000,000
24	KALIMANTAN UTARA	Rp. 430,000	Rp. 130,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,000,000
24	SULAWESI UTARA	Rp. 370,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,200,000
25	GORONTALO	Rp. 370,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 1,320,000
26	SULAWESI BARAT	Rp. 410,000	Rp. 120,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 1,260,000
27	SULAWESI SELATAN	Rp. 430,000	Rp. 130,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 4,820,000
	Kecuali:					
	KAB. LUWU	Rp. 300,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,374,000
	KAB. LUWU UTARA	Rp. 300,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,856,000
	KAB. TORAJA UTARA	Rp. 300,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,856,000
28	SULAWESI TENGAH	Rp. 370,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 2,030,000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp. 380,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 1,850,000
30	MALUKU	Rp. 380,000	Rp. 110,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,000,000
31	MALUKU UTARA	Rp. 430,000	Rp. 130,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 3,110,000
32	PAPUA	Rp. 580,000	Rp. 170,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 2,850,000
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp. 480,000	Rp. 140,000	Rp. 250,000	Rp. 200,000	Rp. 2,750,000

**SATUAN BIAYA HARIAN, REPRESENTASI DAN AKOMADASI DPRD
DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

No.	TUJUAN	UANG HARIAN		UANG REPRESENTASI			AKOMODASI
		LUAR DAERAH	DIKLAT	KETUA	WAKIL KETUA	ANGGOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NANGROE ACEH	Rp 360,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,308,000
2	SUMATERA UTARA	Rp 370,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,214,000
3	RIAU	Rp 370,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,168,000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 370,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,285,000
5	JAMBI	Rp 370,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,176,000
6	SUMATERA BARAT	Rp 380,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,155,000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 380,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,228,000
8	LAMPUNG	Rp 380,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,299,000
9	BENGLU	Rp 380,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,190,000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 410,000	Rp 120,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,310,000
11	BANTEN	Rp 370,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,430,000
12	JAWA BARAT	Rp 430,000	Rp 130,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,753,000
13	D.K.I JAKARTA	Rp 530,000	Rp 160,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,086,000
14	JAWA TENGAH	Rp 370,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,478,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp 420,000	Rp 130,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,334,000
16	JAWA TIMUR	Rp 410,000	Rp 120,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,359,000
17	BALI	Rp 480,000	Rp 140,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,810,000
18	NUSATENGGAH BARAT	Rp 440,000	Rp 130,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 2,738,000
19	NUSATENGGAH TIMUR	Rp 430,000	Rp 130,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,000,000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 380,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,130,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 360,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,596,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 380,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,679,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 430,000	Rp 130,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 3,021,000
24	KALIMANTAN UTARA	Rp 430,000	Rp 130,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 3,021,000
24	SULAWESI UTARA	Rp 370,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,559,000
25	GORONTALO	Rp 370,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,134,000
26	SULAWESI BARAT	Rp 410,000	Rp 120,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,030,000
27	SULAWESI SELATAN	Rp 430,000	Rp 130,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,912,000
	Kecuali:						
	KAB. LUWU	Rp 300,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,338,000
	KAB. LUWU UTARA	Rp 300,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,529,000
	KAB. TORAJA UTARA	Rp 300,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,529,000
28	SULAWESI TENGAH	Rp 370,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,298,000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 380,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,070,000
30	MALUKU	Rp 380,000	Rp 110,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,030,000
31	MALUKU UTARA	Rp 430,000	Rp 130,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,512,000
32	PAPUA	Rp 580,000	Rp 170,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,668,000
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp 480,000	Rp 140,000	Rp 150,000	Rp 125,000	Rp 100,000	Rp 1,482,000

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
KELUAR DAERAH**

NO	PROVINSI	SATUAN	ESELON/GOLONGAN			
			ESELON II	ESELON III/ GOLONGAN IV	ESELON IV/ GOLONGAN III	STAF/ GOLONGAN II/I
1	ACEH	OH	Rp. 1,308,000	Rp. 1,080,000	Rp. 410,000	Rp. 370,000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 1,214,000	Rp. 703,000	Rp. 505,000	Rp. 310,000
3	RIA U	OH	Rp. 1,168,000	Rp. 868,000	Rp. 450,000	Rp. 380,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 1,285,000	Rp. 650,000	Rp. 502,000	Rp. 280,000
5	J A M B I	OH	Rp. 1,176,000	Rp. 697,000	Rp. 382,000	Rp. 290,000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 1,155,000	Rp. 884,000	Rp. 477,000	Rp. 370,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 1,228,000	Rp. 605,000	Rp. 514,000	Rp. 310,000
8	LAMPUNG	OH	Rp. 1,299,000	Rp. 790,000	Rp. 374,000	Rp. 356,000
9	BENGKULU	OH	Rp. 790,000	Rp. 712,000	Rp. 599,000	Rp. 510,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 1,310,000	Rp. 850,000	Rp. 533,000	Rp. 304,000
11	BANTEN	OH	Rp. 1,430,000	Rp. 1,024,000	Rp. 797,000	Rp. 400,000
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 1,753,000	Rp. 949,000	Rp. 515,000	Rp. 463,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 1,086,000	Rp. 800,000	Rp. 610,000	Rp. 400,000
14	JAWATENGAH	OH	Rp. 1,478,000	Rp. 1,024,000	Rp. 497,000	Rp. 350,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 1,334,000	Rp. 747,000	Rp. 629,000	Rp. 461,000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 1,359,000	Rp. 841,000	Rp. 499,000	Rp. 329,000
17	B A L I	OH	Rp. 1,810,000	Rp. 1,304,000	Rp. 904,000	Rp. 658,000
18	NTB	OH	Rp. 2,738,000	Rp. 737,000	Rp. 540,000	Rp. 360,000
19	NTT	OH	Rp. 1,000,000	Rp. 700,000	Rp. 662,000	Rp. 400,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 1,130,000	Rp. 866,000	Rp. 430,000	Rp. 361,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 1,596,000	Rp. 923,000	Rp. 558,000	Rp. 436,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 1,679,000	Rp. 816,000	Rp. 500,000	Rp. 379,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 3,021,000	Rp. 1,596,000	Rp. 550,000	Rp. 450,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 3,021,000	Rp. 1,596,000	Rp. 550,000	Rp. 450,000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 1,553,000	Rp. 640,000	Rp. 549,000	Rp. 342,000
26	GORONTALO	OH	Rp. 1,134,000	Rp. 910,000	Rp. 423,000	Rp. 240,000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 1,030,000	Rp. 910,000	Rp. 425,000	Rp. 360,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 1,912,000	Rp. 968,000	Rp. 539,000	Rp. 378,000
	Kecuali:					
	KAB. LUWU	OH	Rp. 1,338,400	Rp. 677,600	Rp. 377,300	Rp. 264,600
	KAB. LUWU UTARA	OH	Rp. 1,529,600	Rp. 774,400	Rp. 431,200	Rp. 302,400
	KAB. TORAJA UTARA	OH	Rp. 1,529,600	Rp. 774,400	Rp. 431,200	Rp. 302,400
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 1,298,000	Rp. 894,000	Rp. 493,000	Rp. 389,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 1,070,000	Rp. 802,000	Rp. 488,000	Rp. 420,000
31	MALUKU	OH	Rp. 1,030,000	Rp. 680,000	Rp. 545,000	Rp. 414,000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 1,512,000	Rp. 600,000	Rp. 478,000	Rp. 380,000
33	PAPUA	OH	Rp. 1,668,000	Rp. 754,000	Rp. 460,000	Rp. 414,000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 1,482,000	Rp. 976,000	Rp. 798,000	Rp. 370,000

Catatan:

1. Nilai diatas merupakan Nilai maksimal untuk setiap penginapan per harinya

**FASILITAS ANGKUTAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI**

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI (Klass)			KET.
		PESAWAT	KAPALLAUT	KERETA API/BUS	
1	ESELON II A	Bisnis	VIP/Kelas I	Eksekutif	Dibayarkan Berdasarkan Biaya Riil
2	ESELON II B	Ekonomi	VIP/Kelas I	Eksekutif	
3	ESELON III	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
4	ESELON IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
5	STAF	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	

Catatan:

1. Biaya Transportasi dibatasi Setinggi-tingginya sama dengan atau lebih kecil dari Standar Biaya moda Transportasi sebagaimana terlampir.

**TABEL JARAK TEMPUH DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
BERDASARKAN KAPASITAS KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**

No.	TUJUAN	JARAK (Km)	PU LANG PERGI (Km)	KAPASITAS KENDARAAN			
				s/d 1.600 CC (liter)	s/d 1.800CC (liter)	s/d 2.000CC (liter)	s/d 3.200CC (liter)
1	MAKASSAR	400	800	115	133	160	200
2	MAROS	370	740	110	123	148	185
3	PANGKEP	348	696	99	116	139	174
4	BARRU	298	596	82	96	115	144
5	PARE-PARE	212	424	60	70	84	105
6	PINRANG	218	436	62	72	87	109
7	SIDRAP	175	350	50	58	70	87
8	SENGKANG	330	660	94	110	132	165
9	SOPPENG	332	664	94	110	132	166
10	BONE	426	852	121	145	170	213
11	SINJAI	620	1240	177	206	248	310
12	GOWA	411	822	117	137	164	205
13	TAKALAR	445	890	127	148	178	222
14	JENEPONTO	491	982	140	163	196	245
15	BANTAENG	440	880	137	160	192	240
16	BULUKUMBA	453	906	129	151	181	226
17	SELAYAR	463	926	132	154	185	231
18	TATOR	80	160	22	26	32	40
19	ENREKANG	154	308	46	54	65	82
20	LUWU	60	120	17	20	24	30
21	LUWU UTARA	64	128	18	21	26	32
22	LUWU TIMUR	234	468	66	78	93	117
23	KOLAKA (SULTRA)	464	928	132	154	185	232
24	POSO (SULTENG)	464	928	132	154	185	232
25	MAMUJU (SULBAR)	420	840	129	150	180	225

Catatan:

1. Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan hanya dapat diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan Kendaraan Dinas.
2. Besaran Harga BBM disesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS
LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

No.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAXI
1	2	3	4
1	NANGROE ACEH	Orang/Kali	Rp 123,000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232,000
3	R I A U	Orang/Kali	Rp 70,000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 105,000
5	J A M B I	Orang/Kali	Rp 128,000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 192,000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 124,000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 148,000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 92,000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 86,000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 320,000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 118,000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 170,000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 50,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 141,000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 148,000
17	B A L I	Orang/Kali	Rp 160,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 218,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 81,000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 145,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 94,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 141,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 401,000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 353,000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 310,000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 134,000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 217,000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 128,000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 151,000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 332,000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 340,000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 403,000
33	P A P U A	Orang/Kali	Rp 354,000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 130,000

Catatan:

1. Nilai Biaya Taxi diatas merupakan biaya maksimal yang dapat diberikan
2. Biaya Taxi dibayarkan secara at cost berdasarkan bukti pembayaran

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO	PROVINSI	SATUAN	Roda4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	ACEH	Hari	Rp. 766,000	Rp. 2,050,000	Rp. 3,670,000
2	SUMATERA UTARA	Hari	Rp. 702,000	Rp. 1,950,000	Rp. 2,920,000
3	RIAU	Hari	Rp. 788,000	Rp. 2,160,000	Rp. 3,130,000
4	KEPULAUAN RIAU	Hari	Rp. 820,000	Rp. 2,160,000	Rp. 3,560,000
5	JAMBI	Hari	Rp. 702,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,020,000
6	SUMATERA BARAT	Hari	Rp. 691,000	Rp. 1,840,000	Rp. 2,920,000
7	SUMATERA SELATAN	Hari	Rp. 691,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,670,000
8	LAMPUNG	Hari	Rp. 691,000	Rp. 1,840,000	Rp. 2,920,000
9	BENGKULU	Hari	Rp. 702,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,020,000
10	BANGKA BELITUNG	Hari	Rp. 766,000	Rp. 2,050,000	Rp. 3,130,000
11	BANTEN	Hari	Rp. 691,000	Rp. 1,840,000	Rp. 2,920,000
12	JAWA BARAT	Hari	Rp. 702,000	Rp. 2,050,000	Rp. 3,020,000
13	D.K.: JAKARTA	Hari	Rp. 702,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,020,000
14	JAWA TENGAH	Hari	Rp. 691,000	Rp. 1,840,000	Rp. 2,920,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Hari	Rp. 702,000	Rp. 1,950,000	Rp. 2,920,000
16	JAWA TIMUR	Hari	Rp. 691,000	Rp. 1,840,000	Rp. 2,920,000
17	BALI	Hari	Rp. 788,000	Rp. 2,270,000	Rp. 3,020,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Hari	Rp. 788,000	Rp. 2,270,000	Rp. 3,020,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Hari	Rp. 799,000	Rp. 2,380,000	Rp. 3,240,000
20	KAUMANTAN BARAT	Hari	Rp. 777,000	Rp. 2,050,000	Rp. 3,350,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Hari	Rp. 820,000	Rp. 2,590,000	Rp. 3,670,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Hari	Rp. 702,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,130,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Hari	Rp. 809,000	Rp. 2,160,000	Rp. 3,560,000
24	KAUMANTAN UTARA	Hari	Rp. 809,000	Rp. 2,160,000	Rp. 3,560,000
25	SULAWESI UTARA	Hari	Rp. 799,000	Rp. 2,050,000	Rp. 3,460,000
26	GORONTALO	Hari	Rp. 734,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,020,000
27	SULAWESI BARAT	Hari	Rp. 702,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,020,000
28	SULAWESI SELATAN	Hari	Rp. 691,000	Rp. 2,270,000	Rp. 3,020,000
29	SULAWESI TENGAH	Hari	Rp. 766,000	Rp. 1,950,000	Rp. 3,130,000
30	SULAWESI TENGGARA	Hari	Rp. 766,000	Rp. 2,050,000	Rp. 3,130,000
31	MALUKU	Hari	Rp. 885,000	Rp. 2,700,000	Rp. 3,780,000
32	MALUKU UTARA	Hari	Rp. 896,000	Rp. 2,810,000	Rp. 3,890,000
33	PAPUA	Hari	Rp. 1,025,000	Rp. 3,780,000	Rp. 4,860,000
34	PAPUA BARAT	Hari	Rp. 971,000	Rp. 3,240,000	Rp. 4,210,000

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG
PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

NO	KOTA		KELAS	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	MAKASSAR	BATAM	Rp 10,375,000	Rp 5,337,000
2	MAKASSAR	JAKARTA	Rp 7,444,000	Rp 3,829,000
3	MAKASSAR	DENPASAR	Rp 4,182,000	Rp 2,631,000
4	MAKASSAR	JAMBI	Rp 9,659,000	Rp 4,952,000
5	MAKASSAR	JOGJAKARTA	Rp 6,525,000	Rp 3,893,000
6	MAKASSAR	KUPANG	Rp 7,637,000	Rp 4,311,000
7	MAKASSAR	BIAK	Rp 8,493,000	Rp 4,931,000
8	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10,193,000	Rp 5,787,000
9	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2,663,000	Rp 1,786,000
10	MAKASSAR	MANADO	Rp 5,327,000	Rp 2,909,000
11	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11,723,000	Rp 6,567,000
12	MAKASSAR	MALANG	Rp 10,129,000	Rp 5,166,000
13	MAKASSAR	MATARAM	Rp 4,717,000	Rp 2,909,000
14	MAKASSAR	MEDAN	Rp 12,514,000	Rp 6,172,000
15	MAKASSAR	PADANG	Rp 10,974,000	Rp 5,402,000
16	MAKASSAR	PALEMBANG	Rp 9,466,000	Rp 4,781,000
17	MAKASSAR	PALU	Rp 4,268,000	Rp 2,578,000
18	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	Rp 9,060,000	Rp 4,663,000
19	MAKASSAR	PONTIANAK	Rp 9,915,000	Rp 5,241,000
20	MAKASSAR	SEMARANG	Rp 9,466,000	Rp 4,706,000
21	MAKASSAR	AMBON	Rp 6,022,000	Rp 3,455,000
22	MAKASSAR	BALIKPAPAN	Rp 12,664,000	Rp 6,150,000
23	MAKASSAR	BANDA ACEH	Rp 12,760,000	Rp 6,781,000
24	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	Rp 8,161,000	Rp 4,161,000
25	MAKASSAR	SOLO	Rp 9,466,000	Rp 4,845,000
26	MAKASSAR	SURABAYA	Rp 5,936,000	Rp 3,433,000

Catatan:

1. Satuan Biaya Tiket pesawat diatas merupakan nilai maximal.
2. Dalam Hal biaya tiket pesawat melebihi nilai yang ditetapkan, maka biaya tiket dibayarkan sesuai nilai diatas kecuali Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dibayarkan sesuai bukti pembelian (biaya rill)
3. Dalam hal daerah tujuan tidak memiliki

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA ANGKUTAN
1	ESELON II A	Rp. 5,000,000	sesuai tarif yang berlaku dan angkutan yang digunakan
2	ESELON II B	Rp. 4,000,000	
3	ESELON III	Rp. 2,500,000	
4	ESELON IV	Rp. 2,000,000	
5	STAF	Rp. 1,500,000	



PEMERINTAH KOTA PALOPO

SKPD

Jl. Andi Djemma No. 139, Telp. (0471) 327458 – 21018, Fax (0471) 327458 Palopo

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR: / /2015

1	Pejabat yang memberi perintah	:	Kepala Dinas
2	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan mengadakan perjalanan dinas	:	
3	J a b a t a n Pangkat / Golongan	: :	
4	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	:	Dari : PALOPO Ke : Transportasi menggunakan :
5	Perjalanan Dinas yang direncanakan	:	Selama : Dari tanggal : s/d. Tanggal :
6	Maksud mengadakan perjalanan dinas	:	
7	Perhitungan Biaya Perjalanan	:	Atas beban : Pemerintah Kota Palopo Kode Rekening :
8	K e t e r a n g a n	:	Lihat sebelah

Dikeluarkan di Palopo
Pada tanggal 2015
KEPALA DINAS/BADAN

.....
NIP.

CONTOH BLANGKO SPPD HALAMAN BELAKANG

	SPPD No. : Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada tanggal : Ke : Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
V. Tiba kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat singkatnya. PPTK <u>NAMA PEJABAT</u>	
VI. CATATAN LAIN- LAIN	
VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesiaahan, kealpaannya.	



PEMERINTAH KOTA PALOPO

NAMA SKPD

Jl. Andi Djemma No. Telp. (0471) Fax, (0471) 22677 Palopo

SURAT TUGAS

Nomor: 900.4/ /DPPKAD/I/xxx

Dasar : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor: KEP-39/PK.1/KPA/PPKED-UH/2013 , maka dengan ini:

MENUGASKAN

Kepada :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :

Untuk :

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kepala SKPD

.....
Nip.

CONTOH BLANGKO SPPD DALAM DAERAH HALAMAN BELAKANG

Berangkat dari :
(tempat kedudukan)
Pukul :
Pada tanggal :
Ke :
Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

I. Tiba di : Berangkat dari :
Pukul : Pukul :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pukul : Pukul :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pukul : Pukul :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

IV. Tiba kembali di :
Pukul :
Pada tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

PPTK

NAMA PEJABAT

V. CATATAN LAIN - LAIN

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



PEMERINTAH KOTA PALOPO

SKPD

Jl. Andi Djemma No Telp. (0471) Fax, (0471) 22677 Palopo

Kepada :
 Dari :
 Tanggal :
 Perihal : Ajuan Persetujuan perjalanan dinas ke

NOTA AJUAN PERJALANAN DINAS

1. Berdasarkan surat maka dengan ini diperhadapkan kepada Bapak/Ibu Nota Ajuan Dalam Rangka ke di Makassar yang akan dilaksanakan dari tanggal s/d Mei 2013. (dasar/alasan perjalanan dinas)
2. Adapun yang akan mengikuti acara tersebut sebagai berikut:
 - a) Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 - b) Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Demikian diperhadapkan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

.....,

.....
 Nip.

IZIN PRINSIP WALIKOTA PALOPO	PERSETUJUAN PIMPINAN SKPD



KOPSURAT SKPD

Jl. Andi Jemma No. 66 Telp. (0471) 326667 Kota Palopo

Kepada Yth : Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran
 Dari : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Nomor : / /2014
 Perihal : Ajuan Biaya Perjalanan Dinas Sementara,-

I. Dasar :

1. Peraturan Walikota Palopo No. 39/ XII /2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

2 a. Surat Perintah	: -	Tanggal	:-
b. Surat Tugas	: -	Tanggal	:-
c. S P P D	: -	Tanggal	:-
3. Atas Nama	: -	Tujuan	: -
4. Pangkat/Golongan	: -		

II. Sehubungan dengan angka romawi I point 1,2 dan 3 tersebut diatas, maka diperhadapkan kepada Bapak Biaya Perjalanan Dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

1. Transportasi	Rp	-	x	0	Rp	-	
2. Akomodasi	Rp	-	x	0 hr	Rp	-	
3. Uang Harian :							
a. Uang Makan	Rp	-	x	0 hr	Rp	-	
b. Uang Saku	Rp	-	x	0 hr	Rp	-	
4. Uang Representasi	Rp	-	x	0 hr	Rp	-	
J U M L A H						Rp	-

Terbilang: (... rupiah)

III. Demikian diajukan kepada Bapak untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.-

Ditetujui oleh : Palopo, 2014
 Pengguna Anggaran PPTK,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.		Rp.	
3.		Rp.	
4.		Rp.	
5.		Rp.	
6.		Rp.	
7.		Rp.	
	JUMLAH.....	Rp.	

telah dibayar sejumlah
Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP.....

Tanggal
telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang Menerima

(.....)
NIP.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Tanggal,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)
NIP.....

Kepada : Kepala Badan /Dinas/Kantor
Dari :
NIP :
Jabatan :
Perihal : Laporan Hasil Perjalanan Dinas,-

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Berdasarkan SPPD Nomor : 094/ /SKPD /2015 tanggal, perihal perjalanan dinas untuk
.....
dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas :

- a. Maksud :
.....
.....
- b. Tujuan :

2. Hasil dan Manfaat yang diperoleh :

- a.
.....
.....
- b.
.....
.....

3. Kesimpulan dan Saran :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini kami buat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Palopo, 2009

Yang melakukan perjalanan dinas,

NIP.

Catatan:

1. Sopir pengantar perjalanan Dinas tidak diwajibkan untuk membuat Lapo perjalanan Dinas.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :
Tanggal dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	TOTAL	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan kami bersedia mengembalikan uang tersebut ke kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

Palopo,
Pelaksana SPPD

Materai
Rp. 6.000

(.....)
NIP.

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOR:

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA :
NIP :
JABATAN :
UNIT KERJA :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas perjalanan Dinas jabatan atas nama:

NAMA :
NIP :
JABATAN :
UNITKERJA :
SKPD :





Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

.....
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat diganti lain oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Palopo,
Yang membuat pernyataan

.....
NIP.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag Dok & Peny PBM		

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR